

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹ Berdasarkan definisi dan pengertian kesejahteraan sosial tersebut. Maka setiap kegiatan pembangunan didalamnya meliputi dimensi ekonomi yang berkaitan dengan aspek material, dan dimensi kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan aspek spiritual. yang berarti antara dimensi ekonomi dan dimensi kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dalam konsep pembangunan.

Pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam bidang fisik dan social yang dapat diwujudkan melalui peningkatan fasilitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tergolong sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional serta memegang peran penting terhadap perubahan suatu wilayah dan kesejahteraan masyarakat agar dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat, juga sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan darat.

Menurut Endah Puji Lestari Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal penting karna dapat menciptakan dan meningkatkan

¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

kesejahteraan masyarakat suatu daerah agar perekonomian di daerah tersebut mengalami peningkatan, sebaliknya jika suatu daerah yang kebutuhan infrastuktur jalannya kurang baik, maka perekonomian daerah tersebut dapat mengalami penurunan.²

Jalan merupakan infrastruktur transportasi darat yang berfungsi sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainya sehingga infrastruktur jalan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah sebagai langkah dan usaha untuk menciptakan kemajuan dibidang sosial, ekonomi, dan juga sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara untuk rakyat sebagai unsur pembangunan nasional.

Menurut Stone infrastruktur adalah berbagai macam fasilitas fisik yang diperlukan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintah dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembangunan limbah dan pelayanan-pelayanan lainnya yang sama.³

Pembangunan infrastruktur fisik suatu daerah merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan suatu daerah tersebut Karna seberapapun besar potensi yang dimiliki suatu daerah atau wilayah jika tidak ada sentuhan pembangunan yang mendukung daerah tersebut, maka akan

² Endahpuji Lestari, Dkk. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan" Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 3. No 5. Hal 800-806.

³ Mega Lestari, Suhadak, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Ekonomi Indonesia", Jurnal Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 70, No. 1, 2019, hlm. 100

sulit tersentuh dengan yang namanya perkembangan dan kemajuan.⁴ Salah satu hal utama dalam pembangunan suatu daerah adalah berupa akses jalan yang merupakan transportasi bagi penduduk setempat dalam menjalankan aktivitas sosialnya dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran serta kemajuan perekonomian suatu daerah atau wilayah. Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, ditentukan pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan desa.

Desa sebagai satuan wilayah terkecil dan tertinggal perlu diorganisir sebaik mungkin. Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 desa merupakan “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia”.⁵

Kedudukan desa dalam undang-undang desa kini lebih kuat, desa dituntut memberikan pelayanan dan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Infrastruktur desa

⁴ Iles Sinta Lestari, 2011, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol.3, No.1, hlm. 2

⁵ Laras Kunthi Annawang, *“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa”*

sendiri menjadi hal penting karena desa yang dikenal sebagai daerah tertinggal terdapat berbagai permasalahan baik itu dari aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, maka dari itu pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Pentingnya transportasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pedesaan merupakan sarana dasar dari pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur transportasi jalan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena dua hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Transportasi jalan yang memadai dapat membantu pemerintah serta masyarakat untuk meningkatkan daya saing potensi yang dimiliki setiap daerah tersebut secara optimal.

Proses pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, yang merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Dalam hal ini itulah sebabnya infrastruktur jalan merupakan termasuk kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu daerah untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang dan berbagai sektor. Seperti yang dikemukakan Midgley bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.⁶

Maka dari itu perlunya kesadaran pemerintah daerah dalam mengatasi

⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, hlm, 4

masalah infrastruktur yang ada, karna semakin baik keadaan infrastruktur suatu daerah, maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan sosial, pendidikan, terutama dibidang ekonomi warga. Jika sudah memiliki infrastruktur yang baik, bisa dipastikan sebuah daerah tersebut memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Ini mengikat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur transportasi maupun infrastruktur jalan.

Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi hal penting untuk dibenahi pemerintah daerah, Karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di pedesaan. Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, ditentukan pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan desa.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Infrastruktur jalan sangat diperlukan untuk jalur transportasi yang akan memudahkan warga dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi maupun pendidikan.⁷ Minimnya sentuhan pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini mengalami kerusakan yang parah terlebih jika hujan deras turun, jalan akan menjadi berlumur dan bisa mengakibatkan banjir yang tingginya bisa mencapai pinggang orang dewasa

⁷ Website jambi-independent.co.id "*Jalan Penghubung Desa Dikeluhkan Warga*". di akses pada 25 januari 2020.

yang dapat membahayakan warga jika sedang berlalu lintas di jalan tersebut.

Tentu saja hal ini membuat efisiensi warga tidak optimal, seperti siswa yang ingin berangkat sekolah dapat terlambat bahkan beberapa memilih tidak berangkat ke sekolah karena jalur yang ditempuh sulit dan memakan waktu yang lama. Dan begitupun dengan bidang lainnya seperti ekonomi dan sosial. Maka dari itu besar harapan masyarakat Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapat perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan jalan desa. Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik akan memudahkan mobilitas dan aksesibilitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa. sehingga dapat memupuni perkembangan kebutuhan warga setempat serta dapat meningkatkan laju sektor pertumbuhan perekonomian, perdagangan dan sektor lainnya.

Pada penelitian terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh Murba berbentuk skripsi, dari Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan mengenai implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong yang dinilai kurang optimal dan masih sangat memprihatinkan dilihat dari segi ketiadaan infrastruktur diantaranya jalanan, jaringan, dan listrik yang belum terealisasi hingga saat ini.

Yang artinya pembangunan di Desa Erecinong masih tergolong tertinggal dalam bidang infrastruktur dan itu ditandai dengan tidak adanya perubahan yang terlihat, mengingat pembangunan sangat mengacu pada adanya perubahan secara menyeluruh.⁸

Pada penelitian terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh Mustika Natsir berbentuk skripsi, dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila, Kecamatan Bangkelekila Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan mengenai pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur dibidang jalan, irigasi, dan jembatan. Pemerintah Lembang Bangkelekila' sampai saat ini terus membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Khususnya dibidang infrastruktur jalan yang merupakan masalah utama masyarakat di desa tersebut.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian skripsi. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan

⁸ Murba, 2017, "*Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erecinong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hlm. 40

⁹ Mustika Natsir, 2017, "*Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara*", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm. 60

ialah *“Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam membangun
2. Apa manfaat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa saja usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pembangun infrastruktur jalan di Desa Harapan Makmur
2. Untuk mengetahui manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan terhadap perekonomian masyarakat yang ada di Desa Harapan Makmur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha mengembangkan keilmuan, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan menambah khasanah kajian pustaka mengenai Minimnya Pembangunan Infrastruktur Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi

Jambi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai wacana niali pendidikan khususnya pendindikan ilmu pemerintahan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam infrastruktur pembangunan daerah.

1.5 Landasan Teori

Cooper dan Schindler dalam Sugiyono mengemukakan bahwa “ *A theory is a set of systematically interrelates concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact)*” yang artinya yaitu teori adalah seperangkat konsep, definisi dan preposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁰

Berdasarkan hasil paparan diatas maka landasan teori dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Pembangunan Infrastruktur

Menurut Fakih pembangunan “proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Effendi pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 52-53

berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Kemudian menurut Suryono “Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan”.¹¹

Prinsip keadilan sosial merupakan tujuan dari pembangunan, selain dari pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan berarti memberikan hak setiap warga masyarakat untuk mengambil peran berdasarkan hak yang sama.

Fox mendefinisikan infrastruktur sebagai, “*those Services derived from the set of public work traditionally supported by the public sector to enhance private sector production and to allow for household consumption*”. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Selanjutnya Vaughn and Pollard, menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.¹²

Pada dasarnya, infrastruktur memiliki arti yang berbeda-beda tergantung

¹¹ Endah Puji, DKK, *Op. Cit.* hlm. 801

¹² Rr Lulus Prapti NSS, “*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Ekonomi Rakyat*”, (Semarang: J. Dinamika Sosbud, 2015) . Vol 17, No. 2, hlm. 84

dari konteksnya namun demikian, umumnya infrastruktur dipahami sebagai suatu kebutuhan dasar fisik yang diperlukan seperti jalan, jalur kereta api, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan/irigasi dan bandar udara yang bertujuan untuk pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan agar ekonomi dapat berjalan.¹³

Berasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayanan publik untuk menunjang serta mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat di suatu daerah.

1.5.2 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peran pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental,

¹³ Mega Lestari, Suhadak, *Op. Cit.*, hlm. 101

dan segi kehidupan spiritual¹⁴

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut perlu dilaksanakan sebagai upaya, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang no 11 tahun 2009 bagian ke 11 pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi :

1. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Melaksanakan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulasi kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
5. Mendorong dan memfassilitasi masyarakat dengan dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Singkatnya, kesejahteraan sosial dapat terwujud yakni ketika individu,

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 44

keluarga, kelompok dan masyarakat dapat memenuhi tiga syarat utama di atas dengan cara management masalah sosial dilakukan dengan baik, kebutuhan terpenuhi dan ada peluang sosial.¹⁵

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus merumuskan kebijakan, melaksanakan jaminan sosial, dan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, serta memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

1.5.3 Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people cetered* atau berpusat kepada masyarakat sebagai subjek dan pelaku pembangunan. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁶

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan masyarakat memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak

¹⁵ Miftachul Huda. "Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).Hal. 72.

¹⁶ Ahmad Sururi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Peresaaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak", Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, No. 2, hlm, 2

yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan ketergantungan menjadi kemandirian¹⁷.

Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga lembaga yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.¹⁸

Dalam telaahnya Suharto terhadap strategi pemberdayaan masyarakat ia mengemukakan adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin yaitu¹⁹:

1. Motivasi
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
3. Manajemen diri
4. Mobilisasi sumberdaya
5. Pembangunan pengembangan jejaring

¹⁷ *Ibid*, hlm 5

¹⁸ Yogi Brawijaya, 2019, "*Strategi Wali Nagari Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman*", Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. Hlm. 15

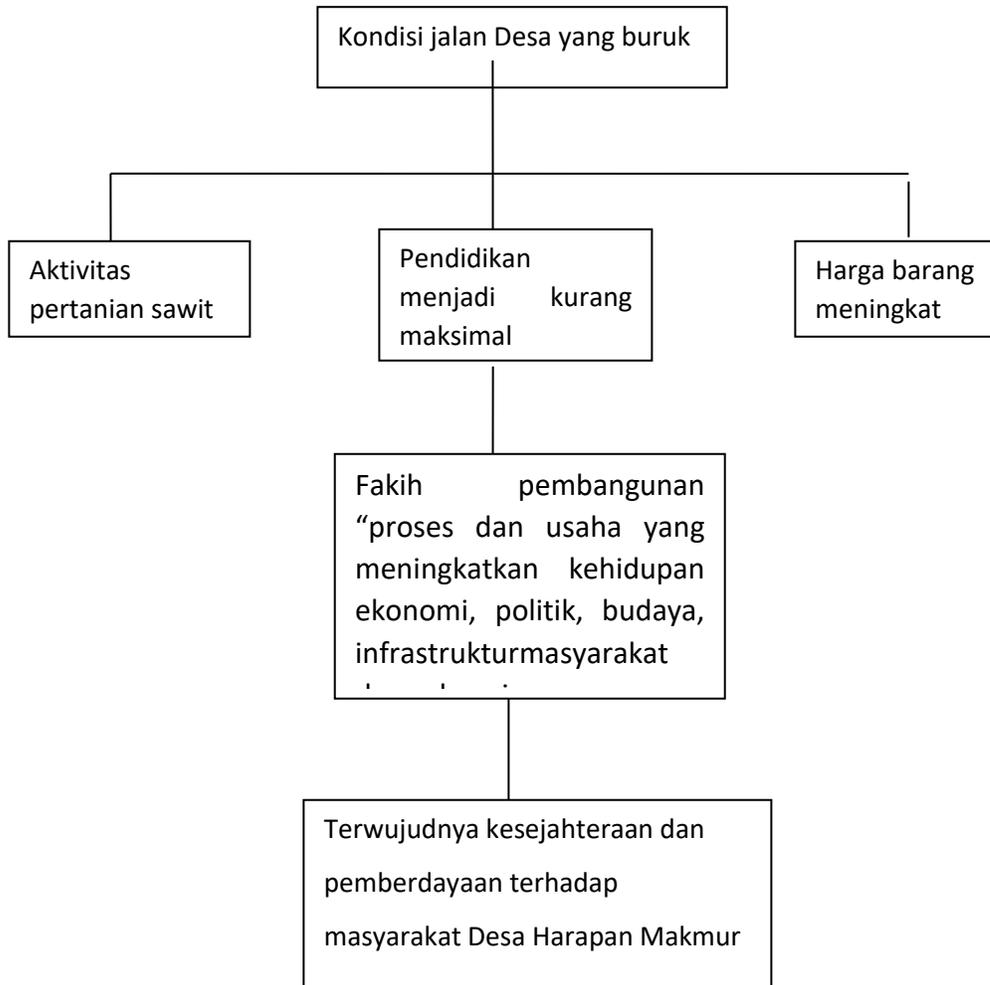
¹⁹ *Ibid*, hlm. 15-16

Dalam hubungan ini Mardikonto menyimpulkan bahwa apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan harus memperhatikan upaya-upaya²⁰:

1. Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat
3. Melengkapi sarana dan prasarana
4. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di masyarakat

²⁰ *Ibid*, hlm. 16

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif

(*qualitative approach*) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghipun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.²¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²²

Sejalan dengan pilihan pendakata tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Dengan metode ini seseorang peneliti hanya perlu menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak (dilihat dan didengar).²³

1.7.2 Lokasi Peneltian

²¹ Dr. Abraham, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung, 2018, hlm, 52

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2011).
hlm.6

Lokasi penelitian merupakan ruang lingkup penelitian untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamat di Desa Harapan Makmur kecamatan Rantau Rasau kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa penggunaan fokus penelitian, maka nantinya penulis akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh pada saat di lapangan.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Data dalam penelitian di klafikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

A. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian menurut Suharsimi, data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak

pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang meliputi kepala Kepala Desa Harapan Makmur, dan masyarakat yang ada dikawasan Desa Harapan Makmur.

B. Data sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen. Kemudian menurut Uber Silalahi, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.

Data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui jurnal, buku-buku, kaya ilmiah, dan bahan referensi lainnya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

A. Metode Observasi

Sutrismo hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²³

Dalam menggunakan observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Fomat yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.²⁴

B. Metode Wawancara

sterberg, wawancara adalah *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in*

²³ Sugiyono, *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, BANDUNG 2013,

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 272.

communication and joint construction of meaning about a particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu.²⁵

Dapat disimpulkan wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada responden yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi maupun data-data.

1.7.6 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini adalah suatu metode atau cara untuk mencari data dari dokumen resmi internal yang berupa memo, kwitansi, nota, pengumuman, instruksi, disposisi dan aturan organisasi, termasuk masalah atau laporan rapat, keputusan dan program kerja pemerintah.²⁶

Dokumentasi di gunakan untuk melengkapi data-data yang di dapati dari hasil observasi dan wawancara. Baik berupa data kependudukan, aktivitas sosial, gotong royong bersama, dan berbagai aktivitas. Dokumen dapat berupa buku harian surat pribadi, laporan, notulen, rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

1.7. Teknik Analisis Data

²⁵ Dr. Ibrahim, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 88

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 274

Dalam menganalisis data ada beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

1.7 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian dan data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

1.8 Penarikan Kesimpulan

Merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.9 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini melihat kecocokan antara data yang diperoleh peneliti dengan kejadian yang menjadi fenomena yang diteliti.

Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian.